

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asmen I KLH, 1982, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Alam Wilayah Pesisir*, Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Baskoro, Haryadi dan Sunaryo, Sudomo, 2010, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta Menurut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Djoko, 2009, *Kraton Yogyakarta. Sejarah, Nasionalisme & Teladan Perjuangan*, Paradigma Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1990, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2007, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Munsyarief. 2013, *Menjamin Kepastian Hukum Atas Tanah Kasultanan*, ombak cv, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- P.Ginting, 2004, *Geografi*, Erlangga, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang jo. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan
Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah Gunung Kidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Dinas-
Dinas Daerah

C. Internet

Surat Kabar Tribun jogja, <http://www.tribunnews.com/> tanggal 31 Januari
2014

Alit Mranani, “Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan
Keraton Kasultanan Di Indonesia”, [http://program.ivaa-
online.org/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-
keraton-kasultanan-di-indonesia-2/](http://program.ivaa-online.org/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/) diakses tanggal 29/04/2015 pukul
11:47

Surat Kabar Online Joglosemar,
[http://edisicetak.joglosemar.co/berita/penggunaan-tanah-keraton-
harus-izin-resmi-3713.html](http://edisicetak.joglosemar.co/berita/penggunaan-tanah-keraton-harus-izin-resmi-3713.html) diakses tanggal 29/04/2015 pukul
14:05

*Keberadaan Tanah Sultan Ground sebagai Dasar Pertanahan di
Yogyakarta* [http://daniputralaw.blogspot.com/2014/05/keberadaan-
sultan-ground-sebagai-dasar.html](http://daniputralaw.blogspot.com/2014/05/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar.html) diakses pada tanggal 19/05/2015
pukul 15:30